

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH DAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA  
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEBO**

**(Studi Kasus pada 27 SKPD Kabupaten Tebo)**

***THE EFFECT OF ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY OF LOCAL  
FINANCIAL MANAGEMENT AND PERFORMANCE-BASED BUDGETING  
ON LOCAL GOVERNMENT TEBO***

***(Case Study at 27 SKPD of Tebo Regency)***



**Oleh:  
FITRI RAHMAWATI  
20140420245**

**PRODI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2018**

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH DAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA  
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEBO

(Studi Kasus pada 27 SKPD Kabupaten Tebo)

Fitri Rahmawati

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Prodi Akutansi Universitas Muhammadiyah  
Yogyakarta

Email: [fitrih8@gmail.com](mailto:fitrih8@gmail.com)

### INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah dan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Teknik Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik survei. Kuesioner disampaikan kepada 81 pegawai pada 27 SKPD Kabupaten Tebo. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda menggunakan bantuan *software SPSS (Statistical Product and Service Solution)*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tebo, transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tebo dan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tebo.

**Kata Kunci:** akuntabilitas, transparansi, pengelolaan keuangan daerah, anggaran berbasis kinerja, kinerja instansi pemerintah.

### ABSTRACT

*The purpose of this research is to examine the influence of district finance management accountability and transparency and performance-based budgeting to district government instance performance. Data was collection using study survey techniques. The questionnaires was delivered to 81 workers in 27 SKPD of Tebo Regency. The data of this study is the primary data. Data was collected by using purposive sampling technique. Hypothesis using multiple regression analysis using SPSS software (Statistical Product and Service Solution).*

*The result of this research show that local finance management accountability positively influenced of the local government Tebo. Local finance management transparency negatively influenced of the local government Tebo. Performance-based budgeting positively influenced of the local government Tebo.*

**Keyword:** *accountability, transparency, financial management, performance-based budgeting, government instance performance.*

## **Latar Belakang Penelitian**

Dewasa ini perkembangan akuntansi sektor publik terus mengalami perkembangan yang sangat signifikan, sejalan dengan di berlakukannya otonomi daerah dan penerapan *good governance* yang ada di Indonesia pada saat ini menjadi tolok ukur untuk pengukuran kinerja pemerintah daerah. Indonesia sebagai penganut prinsip *good governance* yaitu dengan melakukan transparansi dan akuntabilitas guna mewujudkan harapan masyarakat dengan kinerja pemerintahan yang akuntabel serta transparan (Wandari dkk., 2015).

Perubahan pola berpikir pemerintah yang semula dari terpusat (sentralistik) dan berganti menjadi otonomi daerah (desentralisasi) yang memiliki dampak secara langsung terhadap tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan berwibawa serta efektif dan efisiensi dalam pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki pemerintah (Wandari dkk., 2015).

Berjalannya reformasi semakin menghidupkan kembali arti demokrasi dalam kehidupan bernegara. Demokrasi identik halnya dengan akuntabilitas. Menerapkan akuntabilitas berarti menerapkan transparansi pula sehingga di antara akuntabilitas dengan transparansi memiliki keterkaitan (Mohamad dkk., 2004).

Akuntabilitas merupakan kemauan memberikan penjelasan dan justifikasi keinginan dan perbuatan kepada yang berkepentingan (Hunt, 2006). Lain hal dengan transparansi yakni mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberi informasi yang relevan atau laporan yang terbuka pada pihak luar atau organisasi mandiri (legislator, auditor, publik) dan dipublikasikan (Haryatmoko, 2011). Pada akhirnya, unsur akuntabilitas dan transparansi menjadi suatu kebutuhan di dalam pengelolaan pemerintah termasuk bidang keuangan (Hudayah, 2012), khususnya dalam hal penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Kinerja pemerintah daerah sangat erat kaitannya dengan

akuntabilitas dan transparansi. Mekanisme akuntabilitas sangat dibutuhkan untuk menciptakan manajemen kinerja yang baik. Penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi keuangan ada kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dapat menciptakan pengelolaan keuangan yang baik dan keberpihakan terhadap rakyat. Implementasi dari akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah diharapkan bisa meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan mampu memberikan pertanggungjawaban dari informasi pengelolaan instansi pemerintah untuk mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik demi kepentingan masyarakat.

Namun fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, terdapat banyak penyimpangan yang berkaitan dengan anggaran di suatu instansi pemerintah. Sadjiarto (2000) menyatakan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran daerah kerap terjadi dan muncul ke permukaan sehingga masyarakat sering kali

mempertanyakan kinerja pemimpin daerah.

Persoalan hukum yang paling bersinggungan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) seperti penyalahgunaan wewenang, kasus suap, pungutan liar, dan penggunaan uang negara untuk keperluan pribadi lainnya. Berbagai kasus terkuak ke publik dan terjadi di kota-kota besar yang mengindikasikan kota-kota lainnya berpotensi pula terjadi penyimpangan tersebut salah satunya di Kabupaten Tebo.

Berikut adalah beberapa contoh kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Tebo:

1. Kasus korupsi paket proyek aspal jalan 21 paket 10 dan paket 11 Muara Niro-Muara Tabun tahun 2011-2013 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 33 Miliar berdasarkan perhitungan audit BPKP Jambi (Ara, 2017 [www.kpknews.co.id](http://www.kpknews.co.id)).
2. Kasus korupsi pembangunan jaringan listrik tahun 2007 di dua desa yaitu Desa Ketalo Kec. Tebo Ilir dan Desa Sapt Mulya Kec. Rimbo Bujang sebesar Rp. 1 Milyar (crew, 2014 [www.teboonline.com](http://www.teboonline.com)).
3. Kasus korupsi proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran yang dilakukan oleh mantan

Bupati Tebo dengan jumlah kerugian negara senilai Rp2 miliar pada tahun 2004 dan 2005 (Antara,2013 sumbar.antaraneews.com).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darmawan, dkk (2015) mengatakan bahwa Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Nadirsyah, Purnama, (2016) bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasar penelitian yang dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin akuntabel dan transparan suatu pengelolaan laporan keuangan daerah, maka kinerja dari pemerintah daerah juga akan meningkat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darmawan, dkk (2015) mengatakan bahwa Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini

memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Nadirsyah, Purnama, (2016) bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasar penelitian yang dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin akuntabel dan transparan suatu pengelolaan laporan keuangan daerah, maka kinerja dari pemerintah daerah juga akan meningkat.

Suparno (2012) mengatakan bahwa akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadirsyah (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Asrida (2012), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh pada kinerja penyusunan RAPBD Kabupaten Bireuen. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Auditya *et, al.* (2013) yang menyatakan bahwa transparansi

berpengaruh positif pada kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu. Hasil serupa yang dilakukan oleh Nadirsyah (2016) menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

*Gap research* dari penelitian ini adalah adanya perbedaan hasil yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai anggaran berbasis kinerja. Nina (2009) meneliti Pengaruh Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah, dengan variabel independen Penganggaran Berbasis Kinerja dan variabel dependen Akuntabilitas Instansi Pemerintah dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah daerah. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Febrina (2016) dan Yuliani (2014) yang menunjukkan bahwa anggaran berbasis kinerja

berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Argumen yang telah diuraikan di atas menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut. Diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan serta anggaran berbasis kinerja untuk meningkatkan kinerja keuangan. Penelitian ini melakukan implementasi antara akuntabilitas, transparansi dan anggaran berbasis kinerja pada kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tebo yang dilihat pada kinerja keseluruhan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Fifit dan Nadirsyah (2016). Perbedaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu adalah terdapat penambahan variabel Anggaran Berbasis Kinerja dan lokasi yang akan diteliti. Hal ini dikarenakan pada tahun anggaran 2016, hasil penilaian akuntabilitas Kabupaten Tebo belum mampu mencapai akuntabilitas kinerja dalam kategori *baik* (LKJ IP, 2016).

Untuk itu sangat diperlukan beberapa upaya untuk dapat lebih meningkatkan kinerja pada beberapa kegiatan, khususnya dalam penerbitan laporan hasil pemeriksaan reguler, kasus pengaduan masyarakat dan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan (*outcomes*). Atas dasar uraian tersebut maka peneliti termotivasi melakukan penelitian ini dengan menambahkan variable anggaran berbasis kinerja.

### **Batasan Masalah**

Batasan masalah ini bertujuan untuk memberikan batasan dari permasalahan yang ada untuk memudahkan penelitian. Dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah maka penelitian ini hanya melakukan pengujian pada tiga faktor yaitu: akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah dan anggaran berbasis kinerja.

### **Rumusan masalah**

Berdasar penjelasan dari latar belakang diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah didalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tebo?
- 2) Apakah terdapat pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tebo?
- 3) Apakah terdapat pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tebo?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka penelitian ini adalah

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tebo.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tebo.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tebo.

### **Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi

penelitian selanjutnya. Hal ini berkaitan dengan masih terbatasnya penelitian dibidang sektor publik di Indonesia, khususnya pada topic yang bersangkutan dengan konsep akuntabilitas, konsep transparansi pengelolaan keuangan daerah dan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja instansi pemerintah daerah

## 2. Manfaat Praktis

### a. Pihak Pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai dampak penerapan good governance government terutama akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja instansi pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kinerja pegawainya.

Masyarakat dalam hal ini yang notabene-nya adalah pengawas dari kinerja pemerintah daerah untuk mengetahui tingkat kinerja pegawainya dari dampaknya atas penerapan konsep akuntabilitas, konsep transparansi pengelolaan keuangan daerah dan anggaran berbasis kinerja sehingga dapat

digunakan sebagai alat pengawasan mengenai kinerja instansi pemerintah daerah

### b. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Diharapkan mampu menjadi bahan pemikiran mengenai instansi pemerintah dan diharapkan mampu menjadi referensi atau informasi bahkan saran yang dapat digunakan pada peneliti selanjutnya.

## **Landasan Teori**

### **Stewardship Theory**

Stewardship theory merupakan suatu teori yang dibangun berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia yang hakikatnya bisa dipercaya, bertindak dengan penuh tanggung jawab, mempunyai integritas dan kejujuran terhadap pihak lain (Donals dan Davis,1991). Teori ini menjelaskan situasi dimana manajemen tidak bertindak untuk kepentingan individu melainkan fokus untuk kepentingan suatu organisasi. Stewardship juga memberikan asumsi bahwa terdapat keterkaitan hubungan yang erat antara kepuasan dan kesuksesan suatu organisasi.

Dalam teori *stewardship* manajer akan bertindak untuk kepentingan bersama. Ketika kepentingan pemilik sumber daya dengan *steward* berbeda, kemudian *steward* akan berusaha menjalin kerjasama dengan pemilik ketimbang untuk menentang kepentingan pemilik karena bagi *steward* kepentingan bersama merupakan hal yang lebih baik karena usaha untuk mencapai tujuan organisasi adalah yang terpenting. Maka, dapat dikatakan bahwa kepuasan pemilik adalah kesuksesan organisasi, namun perlu diingat bahwa *steward* juga memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup (Raharjo, 2007).

### **Kinerja Pemaerintah Daerah**

Kinerja merupakan suatu gambaran tentang tingkaan pencapaian dari pelaksanaan kegiatan atau kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Hal tersebut juga menjelaskan bahwa kinerja merupakan suatu proses dari umpan balik atas kinerja masa lalu guna meningkatkan produktivitas kinerja di masa yang akan datang

sebagai suatu proses yang berkesinambungan.

Kinerja pemerintah adalah suatu gambaran tentang pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (Permenpan:2007).

Bastian (2006) mengatakan bahwa indikator kinerja merupakan suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan beberapa indikator, yaitu indkator masukan (*inputs*), Keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impacts*).

### **Akuntabilitas**

Akuntabilitas keuanagan adalah suatu pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*public money*) secara ekonomis, efisiensi, dan efektif, tidak ada pemborosan dan pembocoran

dana ataupun korupsi. Akuntabilitas lebih menekankan kepada ukuran anggaran dan finansial (Mahmudi, 2007).

Akuntabilitas memberikan persyaratan untuk proses pengambilan keputusan harus sesuai dengan amanat yang telah diterima. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah bahwa setiap transaksi yang akan dilakukan dapat dilacak oleh pihak otoritas. Kemudian aspek dalam pengelolaan keuangan juga memberikan perlindungan asset secara fisik ataupun finansial untuk mencegah terjadinya perilaku pemborosan. Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa kepengurusan kebijakan dilakukan bersamaan dengan cara dan hasil kebijakan tersebut bisa diakses dan dikomunikasikan dengan baik.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah suatu bagian yang sangat penting untuk mengukur kinerja pemerintah daerah. Hasil dari pertanggungjawaban laporan

keuangan daerah sangat berpengaruh besar dalam penilaian kinerja pemerintah. Semakin akuntabel tingkat pengelolaan keuangan daerah maka tingkat pencapaian kinerja pemerintah tersebut akan semakin baik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nadirsyah (2016) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabel pengelolaan keuangan daerah maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

### **Transparansi**

Transparansi merupakan suatu keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai aktivitas-aktivitas pengelolaan dari sumber daya publik yang ditujukan kepada pihak yang membutuhkan informasi (Adisasmita, 2011). Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan lainnya yang

digunakan dalam keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

Transparansi pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, dan merupakan prinsip dari *good governance*. Pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada publik agar publik bisa mengetahui, memberikan saran dan kritik, serta dapat mengukur kinerja pemerintah. Dalam proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh pemangku kepentingan maka informasi akuntansi yang dibutuhkan yaitu berupa laporan keuangan.”

Menurut Wiguna *et al.*, (2015) transparansi merupakan suatu tata kelola keuangan daerah untuk publik dan merupakan suatu bentuk dari keberhasilan kinerja pemerintah dalam pengelolaan dana dan sebagai bukti kinerja pemerintah daerah sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat ditandai dengan bertambahnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah dalam

melakukan transparansi pengelolaan keuangan.

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu periode kedepan. Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 1 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dan tentunya dalam batas kewenangan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk keuangan daerah.

Edward (1992) menyatakan bahwa manajemen keuangan daerah dapat dilakukan dengan baik jika

pemerintah daerah dapat mendefinisikan secara jelas tujuan dari manajemen keuangan.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa setiap pengeluaran pemerintah harus dipertimbangkan dampak lanjut dari pengeluaran tersebut, bukan pengeluaran yang didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu. Dengan demikian setiap pengeluaran pemerintah daerah harus diperhatikan fungsi dan tujuannya serta mempertimbangkan kemampuan daerah.

### **Anggaran Berbasis Kinerja**

Anggaran berbasis kinerja menurut PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, penganggaran daerah di Indonesia disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan dalam setiap kegiatan dengan keluaran hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran

tersebut (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2005).

Halim (2007) menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kinerja.

Menurut kepmendagri No.29 Tahun 2002 pengertian anggaran berbasis kinerja adalah:

- a. Suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.
- b. Didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Anggaran dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan.
- c. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan *value for money* dan efektifitas anggaran.
- d. Anggaran kinerja merupakan sistem yang mencakup kegiatan

penyusunan program dan tolak ukur (*indicator*) kinerja sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran program.

### **Penelitian Terdahulu dan Hipotesis Penelitian**

#### **1. Hubungan antara Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah**

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggung jawaban pemerintah atas seluruh aktivitas yang dilakukan, bukan hanya aktivitas finansialnya saja. Konsep ini menekankan bahwa laporan keuangan pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan pemerintahan (kinerjanya) harus dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik (Halim, 2002).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian

terpenting dalam mengukur kinerja pemerintah daerah, dimana hasil pertanggungjawaban laporan keuangan memiliki pengaruh yang besar dalam menilai baik buruknya kinerja pemerintah. Semakin akuntabel tingkat pengelolaan keuangan daerah maka akan semakin baik pula tingkat pencapaian kinerja pemerintah. Wiguna et al., (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik terkait pelaksanaan pengelolaan pemerintahan yang telah dilakukan, dimana akuntabilitas sendiri merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan daerah, maka hal ini menjadi kewajiban bagi pelaksana pemerintahan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Auditya et al., (2015) menyatakan bahwa akuntabilitas

pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD. Semakin akuntabel pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan dalam SKPD maka akan semakin meningkatkan kinerja.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H1** : Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten Tebo.

## 2. Hubungan antara Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Garini (2011) menyatakan Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Perwujudan dari transparansi sebagai amanat peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pemerintahan telah memberikan tekanan kepada aparatur pengelola pemerintahan untuk membuka diri terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi seluas-luasnya dengan benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Alasan ini akan menjadikan aparatur pemerintah akan menampilkan kinerja terbaiknya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sehingga dia akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dengan sendirinya kinerja pemerintah daerah juga akan baik.

Wiguna et al., (2015) menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Transparansi pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah kepada publik merupakan bentuk keberhasilan pemerintah dalam mengelola dana yang ada dan hal ini adalah bukti bahwa kinerja pemerintah semakin baik. Hasil penelitian Adiwirya dan Sudana (2015) juga menyatakan bahwa transparansi berpengaruh pada anggaran berbasis kinerja SKPD.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Auditya et al., (2013) menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD. Transparansi pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah kepada publik merupakan suatu bentuk bukti keberhasilan kinerja pemerintah yang semakin baik.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

**H2** : Transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten Tebo.

### 3. Hubungan antara Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Anggaran Berbasis Kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat terhadap Visi, Misi dan Rencana Strategis organisasi. Anggaran Berbasis Kinerja mengalokasikan sumberdaya pada program bukan pada unit organisasi semata dan memakai output measurement sebagai indikator kinerja organisasi (Bastian, 2006).

Ika (2013) menyatakan bahwa penerapan Anggaran Berbasis

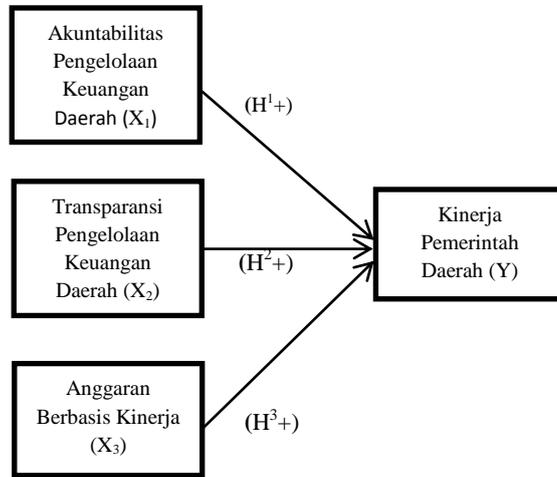
kinerja berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian Silalahi (2012) menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yusriati (2008) sejalan dengan diberlakukannya anggaran berbasis kinerja.

Peneliti menduga bahwa semakin tinggi penerapan anggaran berbasis kinerja, maka akan semakin tinggi pula kinerja aparatur pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Febrina (2016), menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

**H3** : Anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten Tebo.

## Model Penelitian



Gambar 2.1 : Model Penelitian

## METODE PENELITIAN

### Objek Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menjelaskan tentang hubungan kausal antara variable-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah dan anggaran berbasis kinerja baik secara simultan maupun parsial terhadap kinerja pemerintah daerah.

### Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data kuantitatif yang

berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari hasil penelitian lapangan pada instansi pemerintahan di Kabupaten Tebo.

### Populasi dan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sampling jenuh atau sensus, yaitu pengambilan sampel dengan menggunakan seluruh anggota populasi untuk dieliti. Hal ini dilakukan dengan alasan karena jumlah populasi yang kurang dari 100 obyek. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah SKPD di Kabupaten Tebo yang berjumlah 27 SKPD, data tersebut di ambil pada tahun 2018 dan terdiri dari Dinas/Badan, Kantor dan Sekretariat. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Instansi, Kepala Sub Bagian Keuangan, atau Staff yang membantu pada setiap SKPD yang akan diteliti. Responden dalam

penelitian ini berjumlah 81 orang dari jumlah sampel yang ada pada setiap SKPD yang akan diteliti. Karena banyaknya jumlah populasi yang akan diteliti, maka digunakan sampling. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti. Oleh karena itu, sampel harus dilihat sebagai suatu pendugaan terhadap populasi dan bukan populasi itu sendiri (Prasetyo dan Jannah, 2010).

### Skala Pengukuran Skor

Jenis pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan skala likert. Pada skala likert biasanya tingkatan penilaian yang digunakan yaitu memberikan peringkat penilaian 1-5 yang akan digunakan dalam menyusun kuesioner pada penelitian ini. Pada kuesioner setiap pertanyaan telah disediakan 5 alternatif jawaban, yaitu sebagai berikut :

No.	Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

## Uji Kualitas Instrumen dan Data

### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran mengenai mean, median, minimum, maximum, dan standar deviation dari masing-masing variable dalam penelitian, yaitu akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah, anggaran berbasis kinerja dan kinerja pemerintah daerah.

### Uji Kualitas Data

#### a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini dapat mengukur apa yang perlu untuk diukur. Jika validitasnya tinggi maka semakin kecil pula tingkat kesalahannya, sehingga data yang digunakan merupakan data yang memadai. Uji validitas dilakukan menggunakan SPSS berdasarkan nilai KMO. Validitas terpenuhi apabila nilai  $KMO > 0,5$  (Nazaruddin dan Basuki, 2017).

#### b. Uji Realibilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan minimal yang dapat diberikan

terhadap kesungguhan jawaban responden yang diterima. Pengujian dilakukan menggunakan SPSS yang dilihat dari nilai cronbachs alpha. Jika nilai cronbachs alpha lebih dari atau sama dengan 0,70 maka reliabilitas terpenuhi (Nazaruddin dan Basuki,2017).

### **Metode Analisis Data**

#### **Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **Uji Normalitas**

Uji Normalitas dilakukan dengan melihat apakah data telah berdistribusi normal. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov Smirnov dengan melihat nilai signifikan pada alpha 0,05. Jika nilai signifikan yang dihasilkan kurang dari alpha 0,05 maka data tidak berdistribusi normal, jika nilai signifikan yang dihasilkan lebih dari alpha 0,05 maka berdistribusi normal (Nazaruddin dan Basuki,2017).

##### **Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah didalam

model terdapat korelasi antar variable independennya. Untuk menguji adanya multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflating Factor*). Jika nilai VIF kurang dari 10 dan atau nilai tolerance lebih dari 0,01, maka tidak ada multikolinearitas diantara variable disimpulkan bahwa tlah terjadi multikolinearitas pada model (Nazaruddin dan Basuki,2017).

##### **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas digunakan uji glesjer. Dalam uji ini, apabila hasilnya signifikan lebih dari alpha 0,05 maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas (Nazaruddin dan Basuki,2017).

#### **Pengujian Hipotesis**

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis untuk mengetahui besarnya pengaruh variable independen terhadap variable independen dan dapat memperkirakan variable depdnden dengan menggunakan variable

independen (Priyatno, 2012). Dalam penelitian ini variable independen yang digunakan adalah akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan dan anggaran berbasis kinerja, sedangkan untuk variable dependen adalah kinerja pemerintah daerah. Bentuk persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Kinerja instansi pemerintah daerah

a : Konstanta

$b_1, b_2, b_3$  : Koefisien regresi

$X_1$  : Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

$X_2$  : Transparansi pengelolaan keuangan daerah

$X_3$  : Anggaran berbasis kinerja

e : Error

Uji Nilai t

Uji t-statistik bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variable bebas terhadap variable tidak bebas dengan variable lain dianggap konstan. Uji t juga digunakan untuk menguji hipotesis dengan asumsi bahwa jika signifikan nilai t yang dapat di analisa regresi menunjukkan kecil dari 5% dalam

arti ( $\alpha = 0,05$ ) , maka variable independen berpengaruh terhadap variable dependen (Nazaruddin dan Basuki, 2017).

Uji F

Uji F-statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua variable bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variable terikat. Setelah F garis regresi ditemukan hasilnya , kemudian dibandingkan dengan Ftabel untuk menentukan nilai Ftabel, tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar  $\alpha=0,05$  dengan derajat kebebasan (*degree of freedom*). Apabila nilai  $F < 0,05$  maka variable bebas dalam model tidak berpengaruh secara bersama-sama, namun apabila nilai  $F > 0,05$  maka variable bebas dalam model berpengaruh secara bersama-sama (Nazaruddin dan Basuki, 2017).

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted Square  $R^2$ )

Untuk mengetahui kontribusi dari variable bebas terhadap variable terikat dilihat dari adjusted R square-nya, pemilihan nilai adjusted R

*square* karena penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan asumsi nilai adjusted 0-1, semakin mendekati 1 maka semakin bagus. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable terikat. Adjusted  $R^2$  berarti  $R^2$  sudah disesuaikan dengan derajat bebas dari masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup didalam perhitungan adjusted  $R^2$  (Nazaruddin dan Basuki, 2017).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis stastik deskriptif

Analisis stastik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran mengenai mean, median, minimum, maximum, da standar deviasi dari masing-masing variable dalam penelitian yaitu akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah, anggaran berbasis kinerja dan kinerja pemerintah daerah. Hasil statistik deskriptif dari tabel diatas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	81	12	30	23.49	4.267
Transparansi Anggaran Berbasis Kinerja	81	9	20	14.93	2.682
Kinerja Pemerintah Daerah	81	14	30	23.00	3.493
Valid N (listwise)	81	24	50	38.90	5.200

Sumber: data primer, diolah Juli 2018

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan perhitungan hasil uji statistik deskriptif mengenai jawaban responden untuk setiap variabel penelitian dimana keseluruhan berjumlah 81 jawaban responden. Nilai variabel akuntabilitas yang telah di olah memiliki skor minimum

12 dan skor maksimum 30. Nilai standar deviasi sebesar 4,267 dan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 23,49 dimana nilai tersebut lebih besar dari dibandingkan dengan nilai minimum yang ditentukan. Maka dapat disimpulkan bahwa responden memiliki pengetahuan yang luas

tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tebo. Pada variabel transparansi dimana variabel memiliki nilai skor minimum 9 dan skor maksimumnya 20. Nilai standar deviasi sebesar 2,682 dan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 14,93 dimana nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai minimum yang ditentukan. Maka dapat disimpulkan bahwa responden memiliki pengetahuan yang baik terhadap transparansi baik secara praktis dan teoritis.

Kemudian untuk variabel anggaran berbasis kinerja dimana variabel ini memiliki jumlah minimum sebesar 14 dan nilai maksimum sebesar 30. Nilai standar deviasi sebesar 3.493 dan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 23,00 dimana nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai minimum yang ditentukan. Maka dapat disimpulkan bahwa responden memiliki pengetahuan yang tinggi tentang anggaran berbasis kinerja pada pemerintah Kabupaten Tebo. Terakhir yakni variabel kinerja pemerintah daerah dimana variabel

ini memiliki skor minimum sebesar 24 dan skor maksimum sebesar 50. Nilai standar deviasi sebesar 5,200 dan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 38,90 dimana nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai minimum yang ditentukan. Maka dapat disimpulkan bahwa responden memiliki pemahaman yang baik tentang kinerja pemerintah Kabupaten Tebo.

#### **Uji Asumsi Klasik**

Berdasarkan hasil uji normalitas nilai *Kolmogorov Smirnov* adalah 0,886 dengan nilai signifikan 0,413 lebih besar dari *alpha* 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas menunjukkan nilai VIF untuk variabel akuntabilitas adalah sebesar 2,364 dan nilai *tolerance* sebesar 0,423, nilai VIF untuk variabel transparansi adalah 1,052 dan nilai *tolerance* sebesar 0,95, nilai VIF untuk variabel anggaran berbasis kinerja adalah sebesar 2,418 dan nilai *tolerance* sebesar 0,414. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut bebas dari asumsi multikolinieritas karena masing-masing variabel memiliki nilai VIF yang kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,01.

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikan untuk masing-masing variabel lebih dari nilai *alpha* 0,05, maka model dari regresi tersebut tidak mengalami heteroskedastisitas.

### Uji Regresi Linier dan Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi linear berganda, teknik analisis regresi linear berganda digunakan untuk memprediksi keterkaitan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda dalam penelitian ini dengan menggunakan SPSS ditunjukkan pada tabel berikut:

Hasil Analisis Regresi  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10.635	3.21		3.313	0.001
1 Akuntabilitas	0.399	0.14	0.328	2.857	0.005
Transparansi	0.211	0.148	0.109	1.425	0.158
Anggaran Berbasis Kinerja	0.684	0.173	0.459	3.962	0

a. Dependent Variable: Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil analisis regresi diperoleh koefisien untuk variabel akuntabilitas adalah sebesar 0,399, untuk variabel transparansi sebesar 0,211 dan untuk variabel anggaran berbasis kinerja sebesar 0,684, sehingga model persamaan regresi

yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$\text{Kinerja} = 10,635 + 0,399AK + 0,211TR + 0,864ABK + e$$

Pertama, berdasarkan tabel hasil regresi didapatkan nilai koefisien beta ( $\beta$ ) 0,399 dan nilai sig 0,005 < *alpha* 0,05 yang berarti bahwa variabel akuntabilitas

pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tebo. Dengan demikian pengujian hipotesis  $H_1$  menyatakan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tebo **diterima**.

Kedua, berdasarkan hasil regresi didapatkan nilai koefisien beta ( $\beta$ ) 0,211 dengan nilai sig 0,158  $> \alpha$  0,05 yang berarti transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tebo. Dengan demikian hipotesis  $H_2$  menyatakan bahwa variabel transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tebo **ditolak**.

Ketiga, berdasarkan hasil regresi didapatkan nilai koefisien beta ( $\beta$ ) 0,648 dengan nilai sig 0,000  $< \alpha$  0,05 yang berarti anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian hipotesis 3 ( $H_3$ ) yang menyatakan bahwa variabel anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja

pemerintah daerah Kabupaten Tebo **diterima**.

Berdasarkan hasil uji nilai T, nilai sig variabel akuntabilitas sebesar 0,005 yang mana nilai tersebut kurang dari 0,05 maka akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Variabel transparansi menunjukkan nilai sig sebesar 0,158 dimana nilai tersebut lebih dari 0,05 maka transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Variabel anggaran berbasis kinerja menunjukkan nilai sebesar 0,000 dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 maka anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Uji F-statistik menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan variabel independen yaitu pengaruh akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah dan anggaran berbasis kinerja dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tebo.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi menjelaskan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,555 yang artinya variabel kinerja pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah, anggaran berbasis kinerja dengan nilai koefisien determinasi sebesar 55,5% sedangkan sisanya 44,5% dipengaruhi oleh variabel diluar model.

## **Pembahasan**

### **Pengujian Hipotesis 1 (H<sub>1</sub>)**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini didapatkan nilai koefisien beta ( $\beta$ ) 0,399 dan nilai sig  $0,005 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tebo. Hal ini berarti bahwa semakin akuntabel pengelolaan keuangan dalam OPD Kabupaten Tebo, maka akan semakin meningkatkan kinerja. Akuntabilitas yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nadirsyah (2016), Riswanto (2016), Auditya (2013), dan Garini (2011) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan menjalankan asas akuntabilitas sebagai pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, melaporkan, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pihak pemerintah guna terwujudnya *good governance* yang lebih baik.

### **Pengujian Hipotesis 2 (H<sub>2</sub>)**

Transparansi adalah suatu keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai (Hamid, 2007). Hal tersebut akan sangat sulit diterapkan apabila pemerintah tidak

melakukan penanganan terhadap kinerjanya dengan baik.

Transparansi juga harus berjalan seimbang dengan kebutuhan akan kerahasiaan suatu lembaga ataupun informasi yang dapat mempengaruhi hak-hak privasi dari individu. Namun pada penelitian ini tidak berhasil membuktikan pernyataan tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam penelitian ini hanya melihat dari lembaga publik yang diteliti. Berkaitan dengan pernyataan yang diberikan oleh peneliti kepada responden. Pada beberapa lembaga publik yang diteliti menyatakan bahwa tidak semua informasi dari lembaga yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini didapatkan nilai koefisien beta ( $\beta$ ) 0,211 dengan nilai sig  $0,158 > 0,05$  yang berarti transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, sejalan dengan penelitian yang dilakukan Asrida (2012) yang menunjukkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Auditya (2013), Nadirsyah (2016), dan Riswanto (2016).

### **Pengujian Hipotesis 3 ( $H_3$ )**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian ini didapatkan nilai koefisien beta ( $\beta$ ) 0,648 dengan nilai sig  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Artinya semakin baik penyerapan anggaran berbasis kinerja maka kinerja pemerintah daerah semakin baik pula.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Yuliani (2014), Adiwirya (2015), dan Febrina (2016). Penerapan anggaran berbasis kinerja agar memiliki program yang menjadi prioritas dan menjabarkannya dalam kegiatan dengan pencapaian hasil yang jelas. Pemerintah juga dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pemanfaatan anggaran agar dapat meningkatkan hasil dari pencapaian organisasi.

## **Simpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan memperoleh bukti secara empiris tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan daerah dan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tebo. Berdasarkan analisis dan pengujian data dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja OPD Kabupaten Tebo. Hal ini menunjukkan bahwa semakin akuntabel pengelolaan keuangan daerah maka semakin meningkatkan kinerja pemerintah.
2. Transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja OPD Kabupaten Tebo. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua informasi dari lembaga dapat diakses langsung oleh masyarakat.
3. Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap kinerja OPD Kabupaten Tebo.

Semakin tinggi penyerapan anggaran berbasis kinerja maka kinerja pemerintah akan semakin baik.

## **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran untuk perbaikan penelitian kedepannya yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan daerah penelitian, misalnya untuk cakupan wilayah Provinsi Jambi.
2. Penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan metode penelitian lain dan tidak terpaku hanya dengan metode penyebaran kuesioner saja, seperti dengan melakukan wawancara singkat kepada responden.
3. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya menambahkan variabel independen selain yang telah digunakan oleh peneliti, misalnya: budaya organisasi, motivasi kerja, komitmen organisasi, dan lain-lain.

## **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang diharapkan dapat diperbaiki pada

penelitian selanjutnya, yakni sebagai berikut:

1. Ruang lingkup penelitian hanya melakukan sebatas pada wilayah Kabupaten Tebo.
2. Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner sebagai metode penelitian tanpa dilengkapi dengan metode wawancara, sehingga rawan terhadap informasi yang bias.
3. Dalam pengambilan data, peneliti ini masih menggunakan kuesioner penelitian terdahulu yang mungkin terjadi kekeliruan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adiwirya, M Firdiansyah., dan Sudana Putu. 2015. Akuntabilitas, Transparansi Dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*. Vol.11, No. 2.
- Antara, 2013. <https://sumbar.antaranews.com/berita/23998/mantan-bupati-tebo-dituntut-18-bulan-penjara/> diakses tanggal 8 Februari 2018
- Anugraheni, I.D., Wahjono, S. I. 2013. Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kediri). *Jurnal Ilmu Manajemen, REVITALISASI*,. Vol. 2, No. 2.
- Ara. 2017. <http://www.kpknews.co.id/2017/10/10/gurita-korupsi-di-tebo-massa-desak-kejaksanaan-agung-tangkap-sukandar/> diakses tanggal 8 Februari 2018
- Asrida, 2012. Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen. *Jurnal Kebangsaan*. Vol. 1. No. 1.
- Auditya, Lucy., Husaini dan Lismawati. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, *Jurnal Fairness* Vol 3, No. 1.
- Bastian, Indra, 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.
- Crew, 2014. <http://www.teboonline.com/2014/10/akhirnya-anak-ditahan-terkait-dugaan.html/> diakses tanggal 8 Februari 2018
- Direktorat Jenderal Peimbangan Keuangan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Garini, Nadia. 2011. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kota Bandung. *Skripsi*. Universitas Komputer Indonesia.

- Hakim, Lukmanul, dkk. 2016. Pengaruh Komitmen Organisasional, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Manajerial (Survey pada SKPD Sumbawa dan Sumbawa Barat), *JAFFA*, Vol, 4 No.2
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Haryatmoko. 2011. *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Kompas Gramedia Building.
- Haspiarti. 2012. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Pemerintah Kota Parepare). *Skripsi*. Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Hunt, G. 2006. *The Principle of Complementarity: Freedom of Information, Public Accountability and Whistleblowing. In Open Government in a Theoretical and Practical Context*, Ed. R. Chapman and M. Hunt Burlington : VT Ashgate
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- \_\_\_\_\_. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Kuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governace. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Volume 2 No. 1
- Nadirsyah, Purnama Fifit. 2016. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 1 No. 2.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: PER/09/M. PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum dan Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Nazaruddin, I., & Basuki, A.T. 2017. *Analisis Statistik dengan SPSS*.
- Raharjo, E. 2007. Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi (Agency Theory Vs Stewardship Theory). *Jurnal Fokus Ekonomi*. Volume 2 No. 1 Juni
- Republik Indonesia. 2000. *Peraturan Pemeritah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- \_\_\_\_\_.2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006. Tentang Pelaporan Keuangan dan Instansi Pemerintah*.
- Riswanto, N. 2016. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan

- Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*. Vol. 6 No. 3
- Silalahi, S.P. 2012. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pemerintahan Di Kota Dumai). *Jurnal Ekonomi*, Vol. 20, No.3
- Setyanigrum, Irna. 2017. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran dengan konsep Value For Money pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Suparno. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan. *Tesis Mahasiswa Universitas Negeri Medan*.
- Verasvera, F.A. 2016. Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Manajemen*, Vol. 15, No. 2 Mei 2016.
- Wiguna, M. B., Yuniartha, G. A., & Darmawan, N. A. 2015. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Yuliani, N.L. 2014. Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*. Vol. 5 No. 2 September 2014.